

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2023**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 | Fax. 0967-571216

Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Sejarah Singkat	6
C. Maksud Dan Tujuan	9
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	10
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	10
B. Tugas Pokok.	10
C. Fungsi.	10
D. Manajemen Kesekretariatan.	11
1. Struktur Organisasi.	11
2. Sumber Daya Manusia.	13
3. Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi.	14
4. Promosi, Mutasi dan Pensiun.	16
5. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis).	16
6. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP.	16
7. Umum Dan Keuangan.	17
7.1. Tata kearsipan Dan Perpustakaan.	17
7.1.1. Pengelolaan Persuratan.	17
7.1.2. Pengelolaan Perpustakaan.	18
7.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.	18
7.2. Pengelolaan Aset dan BMN.	18
7.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan.	18
7.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN.	23
7.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN.	23
7.3. Realisasi dan Penerimaan Anggaran.	23
7.3.1. Laporan Realisasi Anggaran.	23
7.3.2. Laporan PNBK.	24

7.3.3. Data Persekot/ Uang Muka Gaji.	25
7.3.4. Ralat SPM.	25
8. Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan (PTIP).	25
8.1. Revisi DIPA/POK.	25
8.2. Pengelolaan Website dan Jaringan.	25
E. Manajemen Kepaniteraan.	25
1. Laporan Keadan Perkara Dan Jenis Perkara.	25
1.1. Laporan Keadaan Perkara.	25
1.2. Laporan Jenis Perkara.	26
1.3. Laporan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK.	27
2. Laporan Pelaksanaan SIPP.	27
3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi Dan Pengaduan.	27
4. Pelayanan Dan Kegiatan Posbakum.	28
5. Tata Kelola Arsip perkara.	29
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	30
A. Kesimpulan.	30
B. Rekomendasi.	30
LAMPIRAN	31
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	32
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	35
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	38
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	41
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	44

DAFTAR TABEL**Hal**

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	7
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	7
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	7
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	8
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	8
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	8
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	9
Tabel 8.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 9.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 10.	Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi.	15
Tabel 11.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	15
Tabel 12.	Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Februari 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	16
Tabel 13.	Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	17
Tabel 14.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Februari 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	18
Tabel 15.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	19
Tabel 16.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	19
Tabel 17.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	19

Tabel 18.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 19.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	24
Tabel 20.	Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	24
Tabel 21.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	24
Tabel 22.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 23.	Laporan Jenis Perkara Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 24.	Laporan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Usaha Negara Jayapura.	27
Tabel 25.	Buku Register Meja Informasi Bulan Februari 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	28
Tabel 26.	Buku Register Meja Pengaduan Bulan Februari 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	28
Tabel 27.	Buku Register Register Pelayanan Posbakum bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Februari secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua**Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat**Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan**Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009
8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

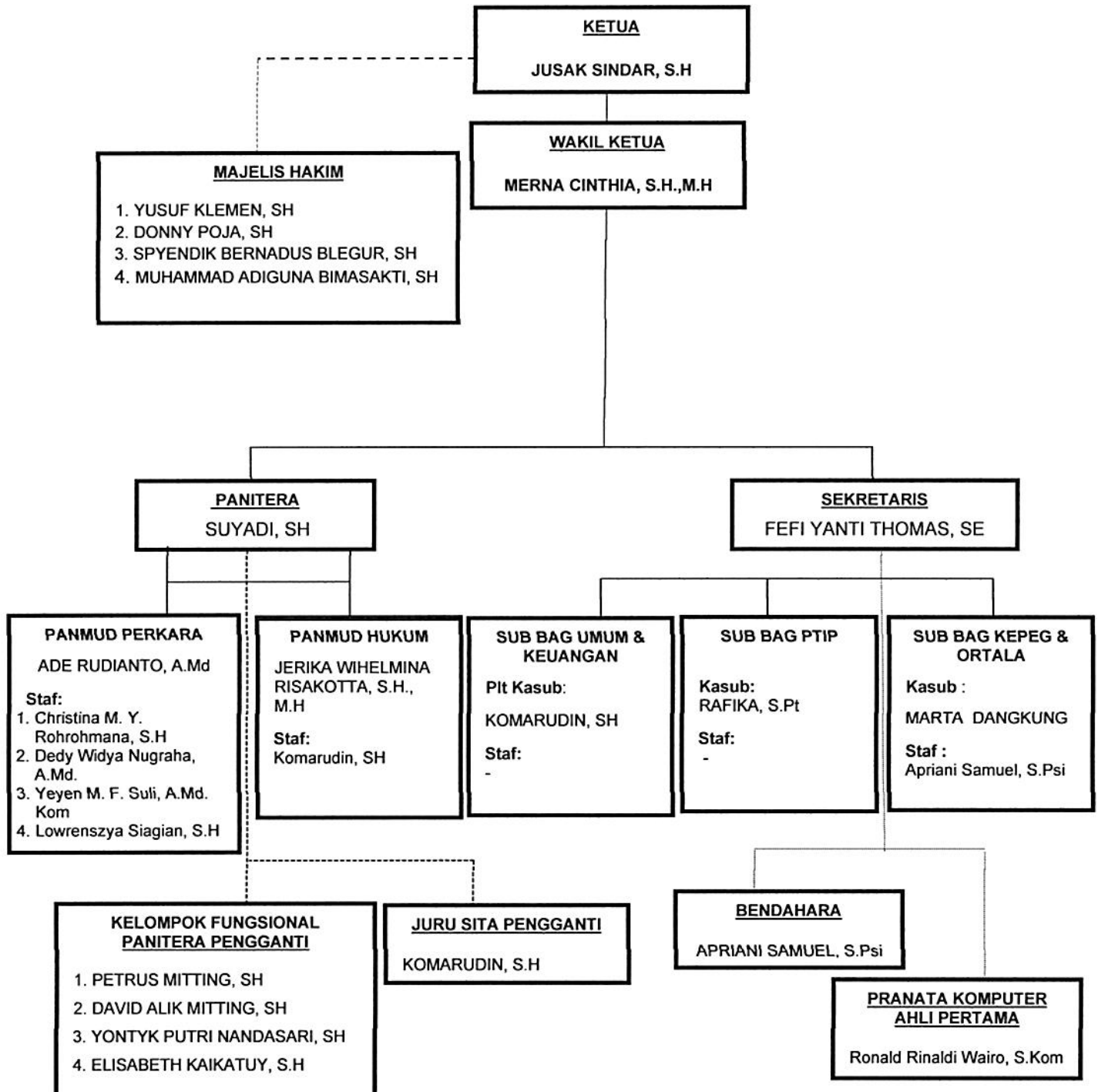
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

D. Manajemen Kesekretariatan**1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



KETERANGAN

----- Garis Koordinasi
———— Garis Tanggung jawab

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 8. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	
6.	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	
7.	Panitera	Suyadi, S.H	
8.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
9.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
10.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
11.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
12.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
13.	Panitera pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	
14.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
15.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
16.	Juru Sita Pengganti	Komarudin, S.H	Plt. Kasub Bag Umum dan Keuangan
17.	Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Marta Dangkung	
18.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
19.	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
20.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
21.	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
22.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
23.	Pengadministrasian Registrasi Perkara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Pengelola BMN
24.	Calon Pegawai Negeri Sipil	Lowrenszya Siagian, S.H	Staf Panmud Perkara

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/a
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
5	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	III/b
6	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	III/b
7	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
8	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
9	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
10	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
11	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
12	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
13	Panitera pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	III/b
14	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
15	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/c
16	Juru Sita Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
17	Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Marta Dangkung	III/d
18	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
19	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/a
20	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/a
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
22	Calon Pegawai Negeri Sipil	Lowrenszya Siagian, S.H	III/a
23	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/c
24	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	II/c

3. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 10. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Meja I
3	Komarudin, S.H	Juru Sita Pengganti	Plt. Kasub Umum dan Keuangan
4	Apriani Samuel, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur.	Bendahara
5	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
6	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengadministrasian Registrasi Perkara.	Pembuat Daftar Gaji dan Operator BMN

Tabel 11. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pramubakti
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Richo D. A. F. Ratu, ST.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Pramubakti
9.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
10.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pengemudi

4. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Februari mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

5. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tabel 12. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PELAKSANA
1.	Donny Poja, S.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Balitbang Hukum dan Peradilan
2.	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W dan Peningkatan Kualitas Data LKKL	KPPN Jayapura
3.	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	Hakim	Uji Publik dan Knowledge Sharing Penyusunan Buku Saku bagi Pimpinan Pengadilan "How To Win The SIPP-EIS" dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
4.	Spyendik B. Blegur, S.H	Hakim	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	PTTUN Manado

6. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh MARTA DANGKUNG sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh MARTA DANGKUNG sebagai user administrator satuan kerja. Hasil

rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	Lengkap	-
6	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H.	Lengkap	-
7	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
8	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
9	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
10	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
11	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
12	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
13	Marta Dangkung	Lengkap	-
14	Yontyk Putri Nandasari, SH	Lengkap	-
15	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
16	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
17	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
18	Komarudin, SH	Lengkap	-
19	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
20	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
21	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
22	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
23	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
24	Lowrenszya Siagian, S.H	Lengkap	-

7. Umum dan Keuangan

7.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

7.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 14. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	6	71
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	23	39
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	3	4
4	Kepaniteraan Perkara.	15	34
5	Kepaniteraan Hukum.	0	1

7.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Februari 2023 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

7.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

7.2. Pengelolaan Aset dan BMN

7.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 15. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	B	1992	1100 m2	120 m2
4	B	1992	1100 m2	120 m2
5	B	1992	1100 m2	120 m2
6	B	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	W4-TUN4/839/PL.01/VIII/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	W4-TUN4/70/PL.01/I/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	B	1100 M2	W4-TUN4/756/PL.01/VII/2023	Muh. Adiguna Bimasakti, S.H	Hakim
4	B	1100 M2	W4-TUN4/72/PL.01/I/2023	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	Hakim
5	B	1100 M2	W4-TUN4/697/PL.01/VI/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 17. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	W4-TUN4/84/PL.06/I/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	PA 1810 DZ	Baik	W4-TUN4/827/PL.06/VIII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	W4-TUN4/82/PL.06/I/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	W4-TUN4/88/PL.06/I/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Baik	W4-TUN4/86/PL.06/I/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	

6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W4-TUN4/ 114/PL.06/I/2023	MASDIN, S.H., M.H.	KETUA	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W4-TUN4/ 1140/PL.06/XI/202 3	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGANTI	
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Baik	W4-TUN4/ 100/PL.06/I/2023	DEDY W. NUGRAHA, A.Md	PENGADMINISTR ASI REGISTRASI PERKARA	PENGELOLA KEUANGAN
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Baik	W4-TUN4/ 92/PL.06/I/2023	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Baik	W4-TUN4/ 98/PL.06/I/2023	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Baik	W4-TUN4/ 90/PL.06/I/2023	PETRUS MITTING, SH	PANITERA PENGANTI	
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	W4-TUN4/ 108/PL.06/I/2023	KOMARUDIN, SH	JURU SITA PENGANTI	PLT. KASUB UMUM DAN KEUANGAN
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Baik	W4-TUN4/ 104/PL.06/I/2023	ELIZABETH KAIKATUY, SH	PANITERA PENGANTI	
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Baik	W4-TUN4/ 110/PL.06/I/2023	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	BENDAHARA PENERIMAAN
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	W4-TUN4/ 94/PL.06/I/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Baik	W4-TUN4/ 102/PL.06/I/2023	YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H	PANITERA PENGANTI	PEJABAT PENGADAAN
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W4-TUN4/ 96/PL.06/I/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	W4-TUN4/ 106/PL.06/I/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 18. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Sedan	1	-	-
4	Mini Bus	4	-	-
5	Sepeda Motor	13	-	2

6	Cermin	2	-	3
7	Rak-rak Penyimpan	14	1	3
8	Lemari Besi	3	-	7
9	Lemari Kayu	30	6	8
10	Brankas	2	-	-
11	CCTV	1	-	-
12	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
13	White Board	1	-	1
14	LCD Proyektor	1	-	-
15	Meja Kerja Kayu	56	14	50
16	Kursi Besi	29	4	44
17	Kursi Kayu	19	31	41
18	Sice	5	3	12
19	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
20	Sketsel	2	-	-
21	Kursi Fiber Glass	23	33	14
22	AC Split	21	-	15
23	Mixer	2	-	1
24	Televisi	3	-	6
25	Amplifire	2	1	-
26	Loudspeaker	6	-	8
27	Tiang Bendera	4	1	1
28	Kaca Hias	1	-	1
29	Palu Sidang	2	-	1
30	Lambang Instansi	1	-	-
31	Handycam	1	-	-
32	Audio Mixing Console	1	-	-
33	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
34	UPS	7	-	2
35	Microphone cable	11	-	-
36	Camera Conference	1	-	-
37	Genset	1	-	-
38	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
39	PC	23	4	13
40	Notebook	9	6	5
41	Printer	4	6	16

42	scanner	1	-	2
43	server	1	-	1
44	router	1	-	1
45	Rak server	1	-	-
46	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
47	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
48	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
49	Pagar permanen	1	-	-
50	Referensi	18	-	-
51	Papan pengumuman	-	1	-
52	Meja komputer	-	1	3
53	Meja Resepsionis	-	1	1
54	Compact disk player	-	1	-
55	Alat tenis meja	-	1	1
56	Lemari Penyimpan	-	-	3
57	Mesin ketik manual standar	-	-	3
58	Mesin Ketik manual Langewagon	-	-	2
59	Rak kayu	-	-	1
60	Filling Cabinet besi	-	-	12
61	Tempat tidur besi	-	-	1
62	Tempat tidur kayu	-	-	3
63	Meja telepon	-	-	1
64	Kasur/spring bed	-	-	7
65	Meja makan kayu	-	-	1
66	Pot bunga	-	-	6
67	Jam elektronik	-	-	10
68	Lemari es	-	-	2
69	Kipas angin	-	-	18
70	Equalizer	-	-	1
71	Sound System	-	-	1
72	Microphone table stand	-	-	6
73	Stabilisator	-	-	3
74	Lambang Garuda Indonesia	-	-	3
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	1
76	Pataka	-	-	5
77	Gordyn/kray	-	-	9

78	Kabel roll	-	-	9
79	Asbak tinggi	-	-	3
80	Keset kaki	-	-	6
81	Kabel	-	-	2
82	Camera digital	-	-	1
83	Key telephone	-	-	5
84	Pesawat telephone	-	-	12
85	Telephone mobile	-	-	2
86	Faximili	-	-	3
87	Antenna SHF Transportable	-	-	2
88	Peralatan antenna SHF	-	-	2
89	All band receiver	-	-	1
90	Alat pemadam kebakaran	-	-	1
91	Generator	-	-	2
92	Stabilizer	-	-	4
93	Internet	-	-	1
94	Hard disk	-	-	3
95	Rambu papan tambahan	-	-	1
96	Monografi	-	-	2
97	Software computer	-	-	1

7.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 Februari 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

7.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Usulan penghapusan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

7.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

7.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 19. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	4.220.241.000	226.891.347	508.456.104	3.711.784.896
2	Barang	1.912.215.000	102.717.823	142.955.823	1.769.259.177
3	Barang Non Operasional	3.296.000	0	1.980.000	1.316.000
4	Modal	38.433.000	0	0	38.433.000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	46.300.000	2.400.000	2.400.000	43.900.000
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

7.3.2. Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Februari Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 21. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.614.888	4.199.363
2	425232	Uang Meja (Leges)	210.000	240.000
3	425233	Ongkos Perkara	0	280.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.003.000	2.307.000
		Total	2.827.888	7.026.363

Laporan realisasi PNBPN secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

7.3.3. Data persekot/ Uang Muka Gaji

Pada Periode bulan Februari Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak mempunyai Persekot.

7.3.4. Ralat SPM

Pada bulan Februari Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura tidak terdapat Ralat SPM.

8. **Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)**

8.1. **Revisi DIPA/POK**

Pada bulan Februari Tahun 2023 tidak dilakukan revisi baik itu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 maupun DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Kode Satker 539139.

8.2. **Pengelolaan Website dan Jaringan**

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2023 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

E. **Manajemen Kepaniteraan**

1. **Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara**

1.1. **Laporan Keadaan Perkara**

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 22. Laporan Keadaan Perkara Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	18	-	1	17	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 23. Laporan Jenis Perkara Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	5	-	5
2	Kepegawaian	4	-	4
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	1
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	-	3
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	1	-	1
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	4	-	4
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	-	-	-
Total		18	-	17

1.3. Laporan jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.

Tabel 24. Laporan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	S/D BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Banding	-	-	-
2	Kasasi	-	-	-
3	Peninjauan Kembali	-	-	-
4	Eksekusi	-	-	-
Total		-	-	-

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.0.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Februari Tahun 2023 adalah 68%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/I/2023 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/I/2023 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 25. Buku Register Meja Informasi Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBYEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Verawati Ngamel, S.H., M.H	2/2/2023	Salinan putusan perkara nomor 19/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
2	Ronald H. Sitorus	8/2/2023	Salinan putusan perkara nomor 40/G/2020/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
3	Hendra Djapara	9/2/2023	Leges Putusan	Mendapat Leges Putusan
4	Anton Y. Koibur	10/2/2023	Salinan putusan perkara nomor 42/G/2021/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
5	Christopher M. Tauran	17/2/2023	Salinan putusan perkara nomor 13/G/2021/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Tabel 26. Buku Register Meja Pengaduan Bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	SUMBER PENGADUAN	TGL DITERIMA	SUBYEK	NO. REGISTER
-	-	-	-	-

4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 27. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Februari Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Les Wakur	Konsultasi Hukum terkait perubahan Nama CV. Jawon Mandiri	1 Jam	-
2	Samsudin	Konsultasi terkait kasus penipuan aplikasi pinjaman online	1 Jam	-
3	Marten Wenggi	Konsultasi Hukum terkait masalah sengketa tanah	1 Jam	-
4	Fransiskus Dimas Palin	Konsultasi hukum terkait perceraian	1 Jam	-

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang saat ini sedang kosong dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA yang memasuki masa pensiun.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya renovasi/pembangunan pagar yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 10 Maret 2023

KETUA

JUSAK SINDAR, S.H
NIP. 19760401 200112 1 002

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN FEBRUARI 2023**

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPAV TGL DIPAV : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPAV TGL DIPAV REVISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	
1	2	3	4	5		7		9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	1066.EBA.962	Layanan Umum										
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521252	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2.296.000	0	0.00%	1.980.000	86.24%	1.980.000	86.24%	316.000	13.76%	
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	B. 521252	Alat bantu jalan	1.000.000	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	1.000.000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	3.296.000	0	0.00%	1.980.000	60.07%	1.980.000	60.07%	1.316.000	39.93%	
	1066.EBA.984	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.246.455.000	86.268.920	6.92%	78.610.120	6.31%	164.879.040	13.23%	1.081.575.960	86.77%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	1.387	6.03%	1.304	5.67%	2.691	11.70%	20.309	88.30%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istien PNS	99.032.000	6.769.090	6.84%	6.003.210	6.06%	12.772.300	12.90%	86.259.700	87.10%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	30.375.000	2.065.588	6.80%	1.873.656	6.17%	3.939.244	12.97%	26.435.756	87.03%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32.760.000	2.340.000	7.14%	2.340.000	7.14%	4.680.000	14.29%	28.080.000	85.71%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.075.850.000	118.255.000	7.06%	82.155.000	4.90%	200.410.000	11.98%	1.475.440.000	88.04%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	258.378.000	16.558.792	6.41%	10.984.597	4.24%	27.523.389	10.65%	230.854.611	89.35%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	73.579.000	4.996.980	6.79%	4.562.460	6.20%	9.559.440	12.99%	64.019.560	87.01%	
	511128	Belanja Uang Makan PNS	257.664.000	9.494.000	3.68%	12.916.000	5.01%	22.410.000	8.70%	235.254.000	91.30%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209.970.000	16.910.000	8.05%	14.360.000	6.84%	31.270.000	14.89%	178.700.000	85.11%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19.355.000	1.105.000	5.71%	1.105.000	5.71%	2.210.000	11.42%	17.145.000	88.58%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	316.800.000	16.600.000	5.30%	12.000.000	3.79%	28.800.000	9.09%	288.000.000	90.91%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	4.220.241.000	281.564.757	6.67%	226.891.347	5.38%	508.456.104	12.05%	3.711.784.896	87.95%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	575.167.000	40.238.000	7.00%	44.527.000	7.74%	84.765.000	14.74%	490.402.000	85.26%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	61.147.000	0	0.00%	940.000	1.54%	940.000	1.54%	60.207.000	98.46%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	234.000.000	0	0.00%	13.495.400	5.77%	13.495.400	5.77%	220.504.600	94.23%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42.000.000	0	0.00%	1.262.520	3.01%	1.262.520	3.01%	40.737.480	96.98%	
	522112	Belanja Langgananan Telepon	6.600.000	0	0.00%	692.057	10.49%	692.057	10.49%	5.907.943	89.51%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/IMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL 5	% 6=(5/4)	TOTAL 7	% 8=(7/4)	TOTAL 9=(5+7)	% 10=(9/4)	TOTAL 11=(4+9)	% 12=(11/4)	
1	2	3	4									13
	522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	0	0.00%	112,000	3.11%	112,000	3.11%	3,488,000	96.89%	
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	3,500,000	0	0.00%		0.00%		0.00%	3,500,000	100.00%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	498,636,000	0	0.00%	204,000	0.04%	204,000	0.04%	498,432,000	99.96%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,713,000	0	0.00%		0.00%		0.00%	56,713,000	100.00%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198,472,000	0	0.00%	18,288,901	9.21%	18,288,901	9.21%	180,183,099	90.79%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	36,696,000	0	0.00%		0.00%		0.00%	36,696,000	100.00%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,604,000	0	0.00%		0.00%		0.00%	80,604,000	100.00%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,080,000	0	0.00%	23,195,945	21.27%	23,195,945	21.27%	85,884,055	78.73%	
	I. 524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	0.00%		0.00%		0.00%	6,000,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002	1,912,215,000	40,238,000	2.10%	102,717,823	5.37%	142,955,823	7.48%	1,769,259,177	92.52%	
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EBB.951	LAYANAN SARANA INTERNAL										
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran										
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Kursi Roda)	4,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4,000,000	100.00%	
	1071.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL										
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										
	A. 533121	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toliet Disabilitas)	34,433,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	34,433,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	38,433,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	38,433,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	6,174,185,000	321,802,757	5.21%	331,589,170	5.37%	653,391,927	10.58%	5,520,793,073	89.42%	

Jumlah Anggaran	6,174,185,000	Persentase
Realisasi Anggaran	653,391,927	10.58%
Sisa Anggaran	5,520,793,073	89.42%



LAMPIRAN 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN JANUARI 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
			TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM									
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA									
	1059.AEA	Koordinasi									
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara									
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang									
	A. 521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	12,000,000	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0	0.00%	12,000,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	12,000,000	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0	0.00%	12,000,000	100.00%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara									
	051	Pos Bantuan Hukum									
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum									
	A. 521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4,100,000	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0	0.00%	4,100,000	100.00%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	28,800,000	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0	0.00%	28,800,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	32,900,000	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0	0.00%	32,900,000	100.00%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
III	1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521211	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	521811	Alat Tulis Kantor	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
	522151	Honorarium Untuk Ahli Penerjemah/Juru Bahasa untu Perkara Tertentu	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	524113	Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.002	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	46,300,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	46,300,000	100.00%	

Jumlah Anggaran	46,300,000	Percentage
Realisasi Anggaran	-	0.00%
Sisa Anggaran	46,300,000	100.00%

Jayapura, 06 Februari 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
 NO. DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPAJ- 005.05.2.539139/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPAJ TGL DIPAJ REVISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	12.000.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	12.000.000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	12.000.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	12.000.000	100.00%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4.100.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4.100.000	100.00%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultan Hukum	28.800.000	0	0.00%	2.400.000	8.33%	2.400.000	8.33%	26.400.000	91.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	32.900.000	0	0.00%	2.400.000	7.29%	2.400.000	7.29%	30.500.000	92.71%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
III	1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521211	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	521811	Alat Tulis Kantor	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
	522151	Honorarium Untuk Ahli Penerimaan/Juru Bahasa unlu Perkara Tertentu	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	524113	Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.002	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	46,300,000	0	0.00%	2,400,000	5.18%	2,400,000	5.18%	43,900,000	94.82%	

Jumlah Anggaran	46,300,000	Percentage
Realisasi Anggaran	2,400,000	5.18%
Sisa Anggaran	43,900,000	94.82%

Jayapura, 01 Maret 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura


 FEF YANTI THOMAS, SE
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Februari 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.01.2.539138/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.614.888,00
3. Selisih	Rp	- 1.614.888,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp. 1.614.888,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 1.614.888,-.



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 11 Mei 2023

Bendahara Penerimaan

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH
NIP 198508172019032006

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Februari 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tanggal, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.05.2.539139/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 PPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 518.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00015/SBS/539139/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	1.731.000,00	1.213.000,00	518.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	1.731.000,00	1.213.000,00	518.000,00
B.	BP Selain Kas	0,00	1.731.000,00	1.213.000,00	518.000,00
	1. BP PNBP	0,00	1.731.000,00	1.213.000,00	518.000,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	518.000,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	518.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	518.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	518.000,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.731.000,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.731.000,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.213.000,00
Saldo Akhir	Rp	518.000,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.213.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.213.000,00
		(*)
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFIYANTI THOMAS, SE
NIP.197903102006042002

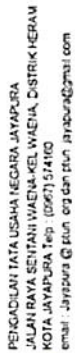
KOTA JAYAPURA , 01 Maret 2023

Bendahara Penerimaan

CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH
NIP 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



FORMULARI-19

[illegible]

SAH Mengetahui:

PANITERA.

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp : (0967) 574160
email : Jayapura @ ptun. org dan ptun. jayapura@gmail.com

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2023

Formulir LI - T2																												
NO	JENIS PERKARA	SISA BULAN LALU			PERKARA			PENGGUGAT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						Permohonan			Terima Berkas			KET.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	
1	2																											28
A	GUGATAN																											
1	Pertanahan	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	Kepegawaian	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	5	-	-	-	
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	KIP	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Lain - Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	18	-	-	18	17	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	1	1	-	-	6	2	-	-	

Jayapura, 28 Februari 2023

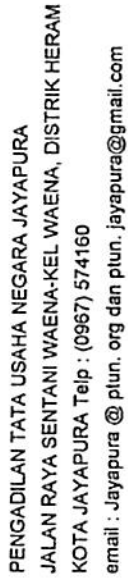
PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002

Wakil Penggugat :

K. B. S. W. JAYAPURA

JUSAK-SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

[illegible]

PANITERA,
 SUYADI SH
 NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp : (0887) 574160
email : Jayapura @ ptun. org dan ptun. jayapura@gmail. com

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN FEBRUARI 2023

Formulir LI - T4

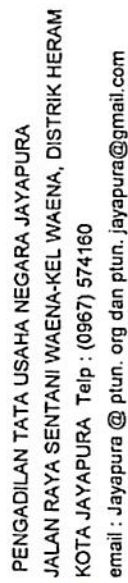
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	10-02-2023	Les Wakur	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULYANTO.SH.,MH. 0811488998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum terkait perubahan Nama CV Jawon Mandiri	
2	-	15-02-2023	Samsudin		Pemohon	Konsultasi terkait Kasus penipuan aplikasi Pinjaman online	
3	-	16-02-2023	Marten Wenggi		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait masalah sengketa Tanah	
4	-	22-02-2023	Fenansisus Dimas Palin		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Perceraian	



Jayapura, 28 Februari 2023

PANITERA,

SUYADL SH
NIP. 197205151994031002



Formulir L1-T5

[illegible]

Mengetahui :

KETUA,



JUSAK SINDAR, SH.

NIP. 197604012001121002

6 PANITERA,

SUYADI, SH

NIP. 197205151994031002



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN FEBRUARI TAHUN 2023

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	61,030,500	-	-	61,030,500
2	Penerimaan	-	2,137,500	-	2,137,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	150,000	150,000
4	Biaya Panggilan	-	-	684,000	684,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	651,000	651,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	523,000	523,000
7	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	250,000	250,000
8	Materai	-	-	10,000	10,000
9	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	120,000	120,000
	b. Redaksi	-	-	10,000	10,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	447,500	447,500
10	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	14,786,000	14,786,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	3,955,000	3,955,000
	Jumlah	61,030,500	2,137,500	21,586,500	41,581,500

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	11,637,500	-	-	11,637,500
2	Penerimaan	-	150,000	-	150,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	1,641,000	1,641,000
	Jumlah	11,637,500	150,000	1,641,000	10,146,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,420,000	-	-	1,420,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
5	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
6	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
7	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,420,000	-	-	1,420,000

Jayapura, 28 Februari 2023

MENGETAHUI :
KETUA,
JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

PANITERA,
SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI - WAENA - JAYAPURA 99358
TELEPON/FAKSIMILI (0967) 571639 (K), 571216 (P)
E-MAIL ptun.jayapura@gmail.com SITUS www.ptun-jayapura.go.id

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PERKARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A 1	Saldo Bulan Lalu	Rp	61.030.500	
2	Jumlah Penerimaan	Rp	2.137.500	
3	Jumlah Pengeluaran	Rp	21.586.500	
4	Saldo Pembukuan	Rp	41.581.500	
5	Saldo			Rp 41.581.500

II Saldo Menurut Kas, terdiri dari :

1	Uang Tunai	Rp	1.536.100	
2	Saldo Bank	Rp	40.045.400	
3	Surat Berharga	Rp	-	
4	Meterai	Rp	- (+)	
5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 41.581.500

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas			
Uang Kertas =	100.000 x 15 lbr	Rp	1.500.000	
	10.000 x 3 lbr	Rp	30.000	
	1.000 x 6 lbr	Rp	6.000	
Uang Logam	100 x 1	Rp	100	
Meterai	-	Rp	- (+)	
Jumlah				Rp 1.536.100

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1	Uang Tunai di Brankas			
Uang Kertas =	100.000 x 14 lbr	Rp	1.400.000	
	10.000 x 2 lbr	Rp	20.000	
Jumlah				Rp 1.420.000

Yang diperiksa
Kasir Perkara

YONTYK PUTRI N., S.H.
NIP. 19910111 200904 2 001

Jayapura, 28 Februari 2023

